**Krepa: Kreativitas Pada Abdimas**
**ISSN 2988-3059**
**Cahaya Ilmu Bangsa**

**Vol 5 No 5 Tahun 2025**
**Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784**

# INTERVENSI PEKERJA SOSIAL DALAM KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK STUDI KASUS DI UPTD PPA PROVINSI SUMATERA UTARA

**Amanda Aulia Putri[1], Malida Putri S.Sos., M.Kesos[2] Fajar Utama Ritonga S.Sos., M.Kesos[3]**
Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara
Kota Medan, Indonesia
Email : mandaaput00@gmail.com[1]
md_putri09yahoo.co.id[2]
fajar.utama@usu.ac.id3

**ABSTRAK**

Studi ini membahas intervensi pekerjaan sosial dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di UPTD PPA Provinsi Sumatera Utara. Dalam prosesnya, pekerja sosial menerapkan tahapan-tahapan pekerjaan sosial, mulai dari tahap pengenalan masalah (engagement), pengkajian (assessment), perencanaan, pelaksanaan intervensi, evaluasi, hingga tahap terminasi. Intervensi juga mengacu pada teori Hirarki Kebutuhan Maslow sebagai dasar dalam memahami dan memenuhi kebutuhan anak, mulai dari kebutuhan dasar seperti perlindungan dan tempat tinggal yang aman, hingga kebutuhan psikologis melalui konseling dan mediasi keluarga. Meskipun intervensi didukung oleh prosedur kelembagaan, tantangan tetap muncul, seperti trauma emosional anak dan kurangnya dukungan dari keluarga. Laporan ini menekankan pentingnya pendekatan multidisipliner, pemantauan berkelanjutan, dan kerja sama antar lembaga dalam menjamin keselamatan dan pemulihan anak secara menyeluruh. Kasus ini menunjukkan bagaimana praktik pekerjaan sosial berperan penting dalam melindungi hak-hak anak dan mendukung proses penyembuhan dalam lingkungan yang aman dan suportif.

**Kata Kunci :** Pekerjaan Sosial, Kekerasan terhadap Anak Intervensi Sosial

***ABSTRACT***

*This report discusses a social work intervention in a child abuse case handled by the UPTD PPA of North Sumatra Province. The social worker implemented the stages of social work practice, including engagement, assessment, planning, intervention, evaluation, and termination. The intervention was also guided by Maslow's Hierarchy of Needs theory, which helped in understanding and addressing the child's needs—from basic needs such as safety and shelter to psychological needs through counseling and family mediation. Although the intervention was supported by institutional procedures, challenges such as the child's emotional trauma and lack of family support persisted. This report highlights the importance of a multidisciplinary approach, continuous monitoring, and collaboration among institutions to ensure the child's safety and holistic recovery. This case illustrates the vital role of professional social work in*

**Article History**
Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025

Plagirism Checker No 234.KK.443
Prefix DOI : **10.9765/Krepa.V218.3784**
Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/Krepa.v1i2.365
**Copyright : Author**
**Publish by : Krepa**

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

**Krepa: Kreativitas Pada Abdimas**
**ISSN 2988-3059**
**Cahaya Ilmu Bangsa**
**Vol 5 No 5 Tahun 2025**
**Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784**

*protecting children's rights and supporting their healing process in a safe and supportive environment.*
***Keywords**: Social Work, Child Abuse, Social Intervention*

## PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih marak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Anak sebagai individu yang belum dewasa termasuk dalam kategori Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PPKS) apabila mengalami kekerasan dalam bentuk fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Kasus kekerasan terhadap anak tidak hanya berdampak langsung pada kesehatan fisik korban, tetapi juga menimbulkan luka psikologis yang mendalam, mengganggu tumbuh kembang anak, serta membentuk pola perilaku negatif dalam jangka panjang. Fenomena ini menjadi perhatian serius dalam dunia kesejahteraan sosial karena menyangkut perlindungan terhadap kelompok rentan yang memerlukan intervensi khusus dari berbagai elemen masyarakat, termasuk pemerintah.

Salah satu lembaga yang memiliki tanggung jawab langsung dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinas P3AKB) Provinsi Sumatera Utara. Lembaga ini hadir sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan bagi korban kekerasan. UPTD PPA memberikan layanan yang bersifat komprehensif dan terintegrasi, termasuk layanan pengaduan, konseling psikologis, pendampingan hukum, hingga rujukan medis dan sosial. Kelebihan dari lembaga ini adalah pendekatan multidisipliner yang memungkinkan korban mendapatkan perlindungan dari berbagai aspek, mulai dari hukum, psikologis, hingga sosial. Selain menjalankan fungsi reaktif dalam menangani kasus yang terjadi, UPTD PPA juga memiliki peran preventif melalui kegiatan penyuluhan, edukasi, dan kampanye anti kekerasan yang ditujukan kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Hal ini sejalan dengan visi nasional dalam membentuk generasi yang sehat secara fisik dan mental.

Dalam praktik pekerjaan sosial, penanganan kasus kekerasan terhadap anak memerlukan penerapan tahapan intervensi sosial yang sistematis dan berbasis profesional. Tahapan ini dimulai dari tahap **engagement**, yaitu membangun hubungan awal yang empatik dan suportif antara pekerja sosial dan klien (anak korban kekerasan). Setelah hubungan terjalin, masuk ke tahap **assessment**, yakni proses pengkajian secara menyeluruh terhadap kondisi anak, termasuk aspek fisik, psikologis, lingkungan keluarga, dan sosial. Data yang dikumpulkan pada tahap ini menjadi dasar dalam merumuskan **perencanaan intervensi** yang tepat. Tahap selanjutnya adalah **intervensi**, yaitu pelaksanaan rencana bantuan sosial seperti pemberian konseling psikologis, penempatan di rumah aman, mediasi keluarga, hingga pendampingan hukum. Intervensi yang dilakukan bersifat individual, namun juga melibatkan keluarga dan lingkungan sosial untuk menciptakan pemulihan yang berkelanjutan. Setelah intervensi dijalankan, pekerja sosial melakukan **evaluasi** untuk menilai efektivitas dari intervensi yang telah dilakukan, dan apakah ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Tahap akhir adalah **terminasi**, yaitu pengakhiran hubungan profesional antara pekerja sosial dan klien, yang dilakukan apabila tujuan intervensi telah tercapai dan klien sudah mampu berfungsi secara lebih adaptif di lingkungan sosialnya. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan dengan tetap

**Krepa: Kreativitas Pada Abdimas**
**ISSN 2988-3059**
**Cahaya Ilmu Bangsa**
**Vol 5 No 5 Tahun 2025**
**Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784**

berpedoman pada prinsip-prinsip pekerjaan sosial dan pendekatan yang berbasis hak anak. Dengan demikian, intervensi sosial yang dilakukan tidak hanya fokus pada pemulihan korban dalam jangka pendek, tetapi juga memastikan bahwa anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung. Penanganan kasus seperti ini menjadi bukti konkret bagaimana pekerjaan sosial berperan penting dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang responsif dan berkeadilan.

## METODE

Pengabdian ini menggunakan jenis penelitian observasi dan wawancara mendalam. Eksplanasi pada penelitian ini tergolong penelitian deskriptif.

## TEMPAT DAN WAKTU

Pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

Tempat : UPTD PPA Provinsi Sumatera Utara
Waktu Pelaksanaan Kegiatan : Maret 2025-Juni 2025

## METODE KEGIATAN

Metode pelaksanaan kegiatan akan disajikan melalui penjelasan dibawah ini :

1. **Assesment**

Assessment dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi fisik dan psikologis klien, TA (13 tahun), korban kekerasan fisik oleh ayah kandungnya. Metode yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan pemeriksaan medis (*visum*). Hasilnya menunjukkan luka fisik dan trauma emosional serius. Klien dinilai membutuhkan perlindungan darurat, konseling psikologis, dan pendampingan hukum.

2. **Intervensi**

Intervensi dilakukan secara langsung melalui pemindahan klien ke rumah aman untuk memenuhi kebutuhan rasa aman. Konseling psikologis dilaksanakan secara bertahap di Biro Minauli, disertai mediasi keluarga. Intervensi bertujuan memulihkan kondisi emosional klien dan membangun kembali lingkungan yang aman.

3. **Evaluasi**

Evaluasi dilakukan untuk menilai perkembangan klien selama intervensi. Hasilnya menunjukkan perubahan positif: klien mulai terbuka, merasa aman, dan menunjukkan respons emosional yang stabil. Evaluasi juga mencakup kesiapan keluarga untuk mendukung pemulihan klien.

4. **Terminasi**

Terminasi dilakukan setelah tujuan intervensi tercapai. Klien menunjukkan peningkatan signifikan secara psikologis dan telah mendapat dukungan dari keluarga. Hubungan pendampingan diakhiri secara profesional dengan tetap membuka ruang pemantauan pasca-intervensi jika dibutuhkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan selama 4 bulan yaitu dari Maret 2025 hingga Juni 2025 dengan melibatkan klien dan UPTD PPA Provinsi Sumatera Utara. Kasus yang ditangani melibatkan seorang anak perempuan yang menjadi korban kekerasan fisik oleh ayah kandungnya. Setelah dilakukan assessment, ditemukan adanya luka fisik dan trauma emosional mendalam. Intervensi dilakukan secara bertahap melalui pemindahan ke rumah aman, konseling psikologis, dan mediasi keluarga. Penerapan tahapan pekerjaan sosial berjalan sesuai

**Krepa: Kreativitas Pada Abdimas**
**ISSN 2988-3059**
**Cahaya Ilmu Bangsa**
**Vol 5 No 5 Tahun 2025**
**Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784**

prosedur: mulai dari engagement, assessment, perencanaan, intervensi, monitoring, hingga terminasi. Selama proses intervensi, kebutuhan dasar anak dipenuhi, terutama kebutuhan akan rasa aman, sesuai dengan Teori Hirarki Kebutuhan Maslow. Evaluasi menunjukkan adanya perkembangan positif dari klien, seperti mulai terbuka secara emosional, merasa lebih aman, dan mampu menjalani aktivitas harian dengan lebih stabil. Keterlibatan keluarga melalui mediasi juga memberikan dampak positif dalam proses pemulihan. Keberhasilan intervensi ini tidak terlepas dari pendekatan multidisipliner dan kerja sama antara UPTD PPA, psikolog, sekolah, serta keluarga. Penanganan kasus dilakukan secara holistik dengan mempertimbangkan aspek fisik, psikologis, dan sosial klien.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil praktik dan intervensi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran hak anak yang berdampak besar terhadap kondisi fisik maupun psikologis korban. Dalam kasus ini, korban mengalami kekerasan fisik dari ayah kandungnya sendiri, yang menyebabkan anak mengalami trauma, ketakutan, dan menarik diri dari lingkungan sekitar.

Proses intervensi dilakukan dengan pendekatan *direct service*, melalui pendampingan langsung, konseling psikologis, serta mediasi keluarga. Pendekatan ini dipilih karena kondisi korban membutuhkan penanganan segera secara emosional dan psikologis. Intervensi dilakukan selama beberapa minggu dan disesuaikan dengan kebutuhan anak, yang bertujuan untuk memulihkan rasa aman, meningkatkan kepercayaan diri, serta mengembalikan kestabilan emosional korban.

Melalui teori Kebutuhan Maslow, proses pemulihan anak dianalisis secara bertahap, dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar akan rasa aman, kemudian kebutuhan psikologis seperti kasih sayang dan penghargaan. Hasil dari proses intervensi menunjukkan adanya perkembangan positif dari anak, yang terlihat dari perubahan perilaku, peningkatan komunikasi, dan mulai munculnya rasa percaya terhadap orang dewasa yang mendampingi.

Selain itu, mediasi kepada keluarga juga memberikan dampak yang penting dalam proses perubahan. Dengan pendekatan edukatif, keluarga—khususnya orang tua—diberikan pemahaman tentang bahaya kekerasan terhadap anak serta pentingnya membangun hubungan yang sehat dan suportif. Keterlibatan keluarga dalam proses pemulihan anak sangat mempengaruhi keberhasilan jangka panjang intervensi.

Melalui praktik ini, dapat disimpulkan pula bahwa peran pekerja sosial sangat dibutuhkan dalam mendampingi anak korban kekerasan, tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai jembatan antara korban, keluarga, dan layanan yang dibutuhkan. Pekerja sosial harus memiliki kemampuan asesmen, komunikasi, serta empati yang kuat untuk memastikan anak merasa aman dan diperhatikan selama proses pemulihan.

**Krepa: Kreativitas Pada Abdimas**
**ISSN 2988-3059**
**Cahaya Ilmu Bangsa**
**Vol 5 No 5 Tahun 2025**
**Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784**

Secara keseluruhan, intervensi yang dilakukan telah mencapai tujuan, yaitu memberikan perlindungan hukum dan dukungan psikososial kepada anak, serta mendorong perubahan sikap dalam lingkungan keluarga. Namun demikian, pengawasan dan monitoring lanjutan tetap perlu dilakukan untuk memastikan anak tidak kembali berada dalam situasi yang membahayakan kesejahteraannya.

**DAFTAR PUSTAKA**

Departemen Sosial Republik Indonesia. (2007). *Pedoman Umum Penanganan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2020). *Pedoman* Kementerian Sosial RI. (2019). *Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Kasus AnakKorban Kekerasan*. Jakarta: Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak.

Maslow, A. H. (1943). *A Theory of Human Motivation*. Psychological Review, 50(4), 370–396.

Nugroho, A. (2018). *Pendampingan Psikososial pada Anak Korban Kekerasan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Susanti, R. (2020). Peran Konseling dalam Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan. *Jurnal Psikologi Terapan*, 8(2), 45–52.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. (Tambahan atas UU No. 23 Tahun 2002). Jakarta: Sekretariat Negara.

Widodo, J. (2018). *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah*